

ABSTRAK

Zulfi Faiz Ramdhani (1213010180): Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/Ag/2024 Tentang Pembagian Harta Waris (Tirkah) Dengan Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/K/AG/2024 tentang pembagian harta waris antara ahli waris pasangan suami istri yang meninggal secara berurutan. Permasalahan muncul karena pembagian harta baru dilakukan sepuluh tahun setelah pewaris terakhir meninggal, serta adanya perbedaan pandangan antara hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi terkait pembagian harta bersama. Hakim banding mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 96 KHI yang mengatur kewajiban pemisahan harta bersama sebelum pembagian warisan, sedangkan hakim kasasi membatalkan putusan tersebut dan setuju dengan putusan hakim tingkat pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami 1) pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam perkara 172/K/AG/2024, 2) menilai relevansi penerapan Pasal 96 KHI dalam perkara 172/K/AG/2024, serta 3) menganalisis akibat hukum tidak digunakannya Pasal 96 KHI pada perkara 172/K/AG/2024.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori hukum waris Islam sebagai dasar analisis dalam menilai penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pembagian harta waris sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis datanya adalah data kualitatif, sumber datanya Putusan Mahkamah Agung No 172/K/AG/2024, data dikumpulkan dengan studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara untuk tambahan data, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) hakim kasasi membatalkan putusan tingkat banding dengan alasan bahwa pada petitum tidak secara eksplisit memuat permintaan pembagian harta Bersama serta fakta bahwa ahli waris dari para pewaris sama sehingga untuk efisiensi hakim menggabung harta waris suami dan istri tersebut. 2) Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam memiliki relevansi yang kuat secara filosofis dan yuridis karena tidak hanya memberikan pedoman hukum yang jelas, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam dalam melindungi hak pasangan. 3) Ketidakpenerapan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi pihak yang berhak. Oleh karena itu, Pasal 96 KHI seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap perkara pembagian harta waris yang melibatkan harta bersama agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Harta Waris, Putusan Mahkamah Agung, Keadilan.